

PROCEEDING

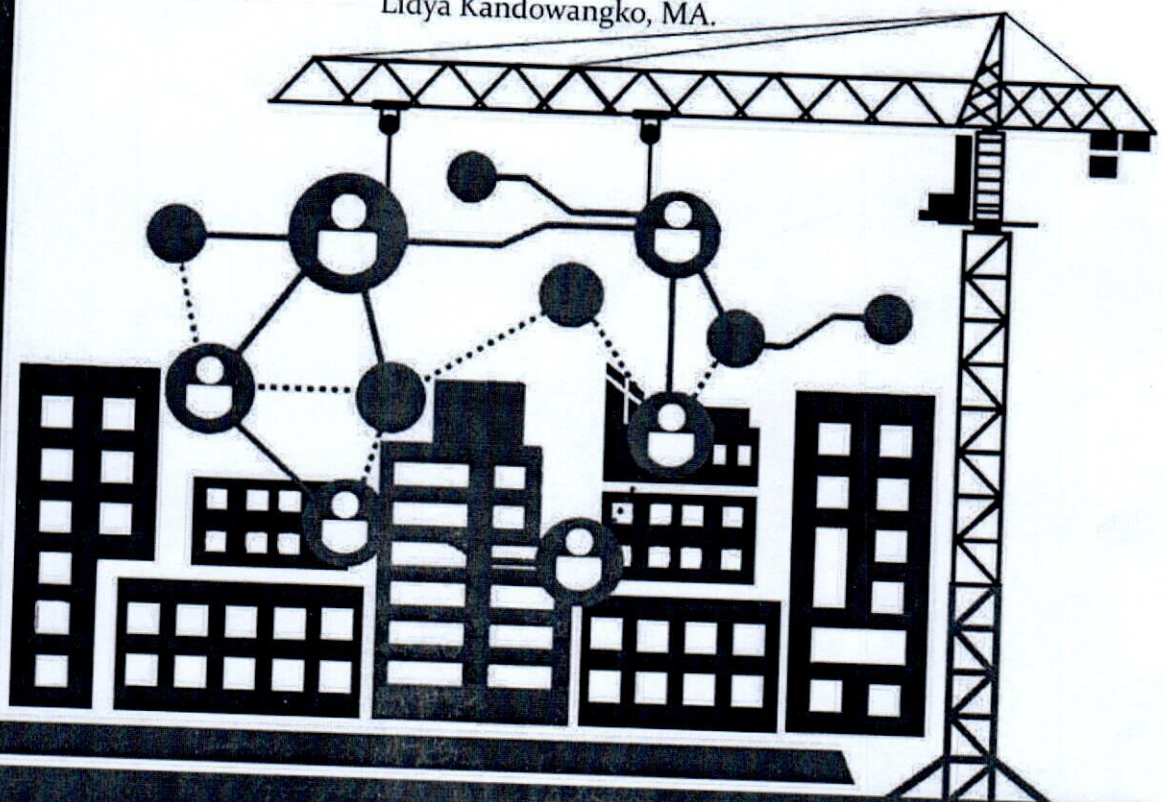
TANTANGAN BARU PEMBANGUNAN DAN PELEMBAGAAN KEBIJAKAN SOSIAL DI INDONESIA

Penyunting:

Drs. Cornelius J. Paat, Msi.

Dr. Antonius Purwanto, MA.

Lidya Kandowanko, MA.



PROCEEDING

TANTANGAN BARU PEMBANGUNAN DAN PELEMBAGAAN KEBIJAKAN SOSIAL DI INDONESIA

Hak Cipta © Drs. Cornelius J. Paat, Msi.; Dr. Antonius Purwanto, MA.;
Lidy Kadowangko, MA., 2016

Hak Terbit pada UMM Press

Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: ummpress@gmail.com

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Cetakan Pertama, April 2016

ISBN : 978-979-796-177-0

xiv; 1055 hlm.; 21 x 29,7 cm

Setting & Layout : Septian R.

Design Cover : A.H. Riyantono

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

Sanksi Pelanggaran pasal 72: Undang-undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SAMBUTAN KETUA PANITIA
Kongres APSSI II dan Konferensi Nasional Sosiologi
di Manado, 20 – 23 Mei 2015

Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera buat kita semua,
Syalom,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kongres APSSI II dan KNS IV dapat dilaksanakan dan mempercayakan kami Jurusan Sosiologi FISIP UNSRAT sebagai tuan rumah. Kongres APSSI II dan KNS IV ini diikuti oleh peserta yang berasal dari seluruh Universitas yang memiliki program studi sosiologi, baik dosen, peneliti, mahasiswa dan pemerhati sosial. Seluruh rangkaian acara yang ada menuntun kita untuk mempererat hubungan pengurus dan anggota APSSI beserta pengajar-pengajar Sosiologi. Kita juga bersama-sama telah memilih struktur kepengurusan yang baru untuk membawa APSSI lebih maju. Untuk menciptakan konsolidasi organisasi dan mengembangkan jaringan program studi.

Tema acara kita yang mengenai Tantangan Baru Pembangunan dan Pelembagaan Kebijakan Sosial di Indonesia adalah persoalan menarik. Pembangunan berlangsung cepat dan tak terbendung. Mengapa kita perlu membahas ini sebagai persoalan ? Kita dapat saksikan bagaimana pembangunan membawa perubahan besar untuk masyarakat. Pembangunan maritim, pertambangan dan pariwisata sedang digalangkan. Namun, pembangunan akhir-akhir ini seringkali kurang memperhatikan pelestarian lingkungan. Air dan udara yang bersih kian susah didapatkan karena polusi dan kurang pepohonan sebagai penghasil oksigen dan penyimpan air. Timbulnya kemiskinan disaat pembangunan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Pembangunan mengubah gaya hidup masyarakat juga membawa arus persoalan yang baru.

Maka, kita butuh terlembagakan kebijakan sosial yang mampu meminimalisir dampak buruk pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah, stakeholder, yang terlibat ditantang bukan hanya menjalankan pembangunan tetapi merumuskan kebijakan yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, kebijakan mengenai jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan proteksi terhadap anak-anak dan kelompok marjinal dikaji dalam penelitian sosial.

Makalah-makalah ilmiah yang disajikan menunjukkan cairnya perspektif sosiologi yang dapat kita aplikasikan untuk menjawab kompleksitas pembangunan dan mengarahkan kebijakan sosial yang sepertinya kurang menjawab kebutuhan masyarakat. Semoga lewat

penulisan makalah yang merupakan hasil penelitian dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya dalam penelitian penulisan karya ilmiah. Begitu juga makalah-makalah ilmiah yang disajikan dapat mempengaruhi arah kebijakan sosial dalam mengadakan pembangunan.

Tentunya acara Kongres APSSI II dan KNS IV ini dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman demi mengembangkan Program Studi Sosiologi dan aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kebersamaan yang kita jalin semoga dapat memajukan program studi sosiologi dan jaringan yang terbentuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya di bidang sosiologi. Karena bila ada kebersamaan dan kuatnya jaringan kita bisa saling membantu dalam mentransfer ilmu yang kita miliki, saling memberdayakan, saling menguatkan sesama program studi maupun dosen dan mahasiswa. Acara ini semoga dapat menyatukan visi dan persepsi sesama anggota APSSI agar dapat berjalan bersama menjawab kebutuhan program studi, baik kepentingan akademis dan pengabdian masyarakat. Terima kasih!

Manado, 22 Mei 2015
Ketua Panitia Kongres APSSI II dan KNS IV Manado

Drs. Jefry C. Paat, MSi

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	iii
SUBTEMA PEMBANGUNAN	
Konsep dan Teori Kontemporer tentang Pembangunan	1
1. <i>Gated Communities</i> : Penanda Segregasi Sosial Masyarakat Urban Yogyakarta Derajad S. Widhyharto	2
2. Media dan Keamanan Pangan Indonesia: Studi Sosiologi Selera Ikma Citra	31
3. Keterbukaan Informasi Publik dan Pembangunan Perdamaian di Aceh Afrizal Tjoetra	44
4. Transformasi Sosiokultural Studi Berbasis Pemetaan Isu Mutakhir Sosiologi Andi Tenri, Andi Asrina	60
Pembangunan yang Berkeadilan dan Ramah Lingkungan	91
1. Pembangunan Berbasis Agama (Gagasan Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Ramah Lingkungan) Jamaluddin Hos	92
2. CSR: Upaya Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Ramah Lingkungan (Studi di PT. Antam Pongkor) Sigit Pranawa	103
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal Berbasis <i>Social Forestry</i> untuk Pengembangan Konservasi Lingkungan dan Ekowisata Hutan Fitri Ramdhani Harahap	116
4. Kinerja Pemerintah Kota Manado Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan – Mapaluse Femmy C. M. Tasik	130
Potensi dan Tantangan Pembangunan Maritim di Indonesia	144
1. Pembangunan Masyarakat Maritim (Dialektika Modernitas dan Lokalitas)	

Bahtiar, Susalman Moita	145
2. Kebijakan Tol Laut: Peluang dan Tantangan Kelangsungan Pelayaran Tradisional Tasrifin Tahara	155
3. Peluang dan Hambatan Pengembangan Maritim Di Kota Bengkulu; Diantara Potensi SDA dan Etos Kerja Masyarakat Lesti Heriyanti	180
4. Modal Sosial Perempuan Sulawesi Utara Sebagai Modal Sosial Di Pintu Gerbang Asia Pasifik Charles R. Ngangi	190
5. Memperkokoh Identitas Keindonesiaan Melalui Ketahanan Budaya Masyarakat Perbatasan Di Bibir Pasifik Studi Kasus Pada Kabupaten Talaud Maria Heny Pratiknjo	197
Lokalitas dan Pembangunan Alternatif Berorientasi Partisipasi Warga	208
1. <i>Community Development</i> Sebagai Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Praktek <i>Community Development</i> oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) di Kec. Kokonao, Kab. Mimika, Prov. Papua Yusdam Arrang Bua	209
2. Lokalitas dan Ikatan Sosial pada Masyarakat Desa Labuku Syamsul Bachri, Andi Burchanuddin, Abdul Malik Iskandar, Harifuddin	228
3. Penguatan Ideologi Kebangsaan Berbasis Pengembangan Potensi Masyarakat Grass-Root di Kota Surakarta Bagus Haryono, Ahmad Zuber	245
4. Mekanisme Bekerjanya Modal Sosial Terhadap Perubahan Aktivitas Mata Pencarian Sebagai Sistem Penghidupan (Livelihood) Pasca Timah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Herdiyanti	258
5. Keberadaan Pangan Lokal dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa	

Soetji Lestari	279
6. Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Pemanfaatan Remiten Migran Internasional dan Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan	
Indraddin	291
7. Penguatan Identitas Masyarakat Lokal (<i>Indigeneous People</i>), Melawan Korporasi dan Menyelamatkan Lingkungan	
Syafruddin	312
8. Selamatan Dusun: Peneguhan Komunitas sebagai Subjek (Studi di Dusun Babatan, Desa Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur)	
Muhammad Hayat	323
9. Pembangunan Masyarakat melalui Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Politik Partisipatif-Integratif berbasis Potensi Lokal	
Vina Salviana	344
10. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Menangani Dan Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Timur Peran Komunitas Dan Lembaga Non-Pemerintah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kab. Bojonegoro, Kab. Pacitan dan Kab. Probolinggo	
Martinus Legowo	351
11. Membangun Kemandirian Masyarakat Petani Padi Pada Kawasan Agropolitan Dumoga Provinsi Sulawesi Utara Dalam Menunjang Percepatan Swa Sembada Pangan Nasional	
Wehelmina Rumawas	385
Kemiskinan, Kerentanan dan Ketidakadilan Baru dalam Pembangunan	400
1. Kerentanan Masyarakat di Periphery Perbatasan Laut Indonesia: Pemetaan Pembangunan di Kelurahan Pemping Kota Batam	
Siti Arieta	401
2. Kemiskinan Struktural Sektor Informal Perkotaan di Makassar (Wajah Buram Pembangunan Perkotaan yang Berkeadilan)	
Syaifullah Canggara	418
3. Kerentanan Komunitas Nelayan dalam Konteks Perubahan Iklim: Studi Kasus di Pulau Ambon, Maluku	
Subair Abdullah	433

4. Pengentasan Kemiskinan berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Rinaldi Ekaputra, Wahyu Pramono, Bob Alfiandi, Merry Anda Yanto	458
5. Hubungan Dialektika Antara Orang Miskin Dengan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Sugeng Harianto	471
Pembangunan Pariwisata Menuju Pemberdayaan Sosial Ekonomi	481
1. Perencanaan Partisipatif Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Bintarsih Sekarningrum, Desi Yunita	482
2. Pedagang Kaki Lima dan Inter-relasi Aktor-Aktor Pariwisata Maksud Hakim, Rosmawati, Rasyidah Zainuddin, Harifuddin Halim, Rivai Mana	494
3. Model Pembangunan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tachya Muhammad, Wahyu Gunawan, Budi Sutrisno	515
4. Pembangunan Sosial dengan Metode Jejaring Kolegial dalam Membangun Kampung Wisata Pasir Ipis Lembang Jawa Barat Wahyu Gunawan, Ari Ganjar Herdiansah	530
5. Pengembangan Ekowisata Berbasis Modal Sosial (Konsep dan Aplikasinya bagi Penguatan Ekonomi Masyarakat Lombok Barat) Sukardi, Wildan, M. Zulfikar Syuaib	542
6. Upaya Pengembangan Wisata Sangiran dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Sudaru Murti	557
7. Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata Kota Manado Very Y. Londa	572
SUBTEMA KEBIJAKAN SOSIAL	
Konsep dan Perspektif Jaminan dan Perlindungan Sosial	585
1. Meneropong Perlindungan Hukum dari Kacamata Kebijakan Sosial (Studi Terhadap Penghukuman Perempuan Pelaku Pembunuhan) Vinita Susanti	586
2. Peran Konsulat Jenderal RI di Hongkong dalam Upaya Meningkatkan	

Kualitas Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hongkong Siti Komariah	599
Perdebatan Populisme, Prorakyat dan Kebijakan Sosial	613
1. Pengembangan Kewirausahaan Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Abdi Rahmat	614
2. Kajian Sosiologis tentang Interaksi Sosial dan Struktur Sosial terhadap Naskah Drama Indonesia, Studi Kasus pada Naskah Drama "Maaf-Maaf-Maaf" Parwitaningsih	635
Model Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Negara dan Partisipasi Warga	654
1. Antara Partisipasi Warga dan "Federasi-Kampung": Dilema Kepemimpinan Kepala Desa di Tasikmalaya Jawa Barat Asep Suryana	655
2. Profesionalisme Petugas Pelayanan Publik Sudirah	677
3. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Perama Swara Tour dan Travel terhadap Kesejahteraan Masyarakat Denpasar Selatan Heri Wahyudi	693
Tantangan dan Model Pelembagaan Kebijakan Jaminan Sosial	710
1. Motif Berperilaku Kepala Desa pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Minahasa Selatan Shirley Y. V. I. Goni	711
2. Dilema Pemenuhan Jaminan Sosial dan Peran Modal Sosial di Daerah Bencana, Studi Kasus: Desa Balerante (Klaten, Jawa Tengah) dan Desa Glagaharjo (Sleman, DIY) Suryo Adi Pramono	723
3. Pondok Baremoh dan Payung Ceper (Studi tentang Perubahan Makna Konsep Perilaku Menyimpang di Provinsi Sumatera Barat) Dwiyantri Hanandini, Nini Anggraini, Indraddin, Wahyu Pramono, Machdaliza	751
Problem dan Tantangan Birokrasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	769

1. Program Kesehatan Gratis dan Budaya Lokal di Kabupaten Mamuju Muhammad Masdar, Haslinda B. Anriani, Roslinawati, Ansar Arifin, Syamsu Kamaruddin	770
2. Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Keluarga Nelayan (Studi terhadap Pengetahuan, Kesadaran, Prilaku dan Akses Istri Nelayan terhadap Kesehatan Reproduksi serta Partisipasi Suami) Fachrina, Maihasni	783
3. Kepuasan Mahasiswa dalam Tutorial <i>Online</i> Bambang Prasetyo	797
4. Korelasi Bantuan Belajar Tutorial <i>Online</i> pada Nilai Ujian Akhir Semester Mahasiswa Universitas Terbuka (Studi Kasus pada Mata Kuliah Logika di Masa Ujian 2013) Haryanto	804
5. Peranan Komunikasi Keluarga dalam Keberhasilan Belajar Siswa SMP di Kota Manado Elfie Mingkid	817
6. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Very Y. Londa, Shirley Y.V.I. Goni	827
Perlindungan Sosial Anak-Anak dan Kelompok Marginal	845
1. Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Surakarta Jawa Tengah Eva Agustinawati, Diffah Hanim, Insiwi Febriary Setiasih	846
2. Pendidikan Inklusi: Perlindungan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Bastiana	855
3. Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak Miskin di Kabupaten Sragen Thomas Aquinas Gutama, Siany Indria Liestyasari, Sumardiyono	864
4. Model Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) di Kecamatan Jagoi babang Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat Herlan, H. Mochtaria M. Noh	883
5. Koran yang Menindas: Studi Eksploitasi Pekerja Anak Penjual Koran di	

Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	
Tri Samnuzulsari	803
6. Pelacuran Anak di Kepri	
Marisa Elsera	923
7. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta	
Imma Indra Dewi, W, Victoria Sundari Handoko	939
8. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Terhadap Anak (Studi pada Anak Jalanan di Surabaya)	
Fakhriyatul Ainayah	962
9. Orang Tua Ideal Masa Kini (Studi Keharmonisan Orang Tua – Anak Pada Empat Etnik di Makassar)	
Maria E. Pandu	986
PENUTUP	
Ucapan Terima Kasih	1055
Dokumentasi	

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTAImma Indra Dewi W.¹⁸ dan Victoria Sundari Handoko¹⁹

Abstrak

Penyandang disabilitas berhak atas jaminan ekonomi, sosial, dan atas tingkat kehidupan yang layak meskipun semuanya tergantung pada kemampuannya. Hak-hak ini diatur dalam *Unofficial Translation* Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975. Hak-hak tersebut juga diakomodir dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kenyataannya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hak-hak penyandang disabilitas tersebut masih belum terpenuhi. Masih banyak dijumpai penyandang disabilitas yang dengan keterbatasannya harus bersaing dengan penduduk normal lainnya dalam rangka pemenuhan hak untuk hidup mandiri, memenuhi kebutuhan ekonomi, eksistensi diri dan pengembangan potensi diri. Meskipun telah dilakukan upaya pelatihan, tetapi kenyataannya belum mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Lebih ironis lagi karena di wilayah Propinsi DIY yang telah mempunyai draft peraturan daerah tentang penyandang disabilitas tetapi sampai saat ini belum juga disahkan. Fakta menarik untuk dikaji. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Propinsi DIY. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemberdayaan di kota Yogyakarta dan empat kabupaten (Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo). Selain itu, terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu: kemiskinan, derajat kecacatan penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah, keterbatasan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Kendala-kendala tersebut perlu dicarikan solusi dan ditemukan model yang sesuai untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kata-kata kunci : *Kendala, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas.*

A.#Pendahuluan

Hak dipahami sebagai sesuatu yang harus diberikan pada semua orang oleh Negara. Pada prinsipnya hak boleh diambil atau tidak oleh pihak yang bersangkutan. Di Indonesia, penyandang disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak yang dijamin oleh hukum. Secara internasional bentuk hukum yang melindungi hak-hak

¹⁸ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹⁹ Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

penyandang disabilitas diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk UU No 11 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hak bagi penyandang disabilitas.

Secara garis besar penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Diantaranya adalah hak untuk menikmati kehidupan yang layak, senormal dan sepuh mungkin, berhak atas upaya-upaya yang dirancang untuk membuatnya menjadi mandiri. Penyandang disabilitas juga berhak atas jaminan ekonomi dan sosial dan atas tingkat kehidupan yang layak meskipun semuanya tergantung pada kemampuannya. Hak ini didefinisikan sebagai hak untuk mendapatkan dan memperoleh pekerjaan atau terlibat dalam pekerjaan yang berguna, produktif, dan menghasilkan penghasilan, serta untuk bergabung dengan serikat pekerja. Hak yang lain adalah agar kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi pertimbangan dalam setiap tingkatan perencanaan ekonomi dan sosial. Hak lainnya adalah untuk hidup dengan keluarga atau orang tua angkat mereka dan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi. Hak-hak ini diatur dalam *Unofficial translation* Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975. Hak-hak tersebut juga diakomodir dalam Undang – Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan PP No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat, penyandang cacat: berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas seperti yang diatur oleh peraturan perundangan maka diperlukan adanya pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan dalam hal ini dipahami sebagai suatu proses kegiatan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat yang dibantu, agar dapat membantu dirinya sendiri. Konsep tersebut sejalan dengan konsep pertolongan dalam pekerjaan sosial yakni *"to help the people to help themselves"* atau membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Membantu orang, kelompok atau masyarakat agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Dalam kaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, perlu adanya peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada penyandang disabilitas. Dasar pemberdayaan adalah falsafah dan budaya demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan mereka.

Meskipun terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas, antara lain:

- 1.# Masyarakat, aparatur pemerintah dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang disabilitas sebagai potensi Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan.
- 2.# Stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga disabilitas merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat, dan martabat keluarga.
- 3.# Pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan.
- 4.# Perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja.
- 5.# Aksesibilitas penyandang disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik yang tersedia sangat terbatas.

Dampak adanya permasalahan tersebut dalam kehidupan penyandang disabilitas adalah :

- 1.# Adanya keterbatasan dalam mengembangkan potensi dirinya.
- 2.# Kurang kemampuan atau keberanian mengungkapkan tentang keinginannya
- 3.# Kesempatan untuk belajar sangat terbatas atau tidak ada sama sekali.
- 4.# Tidak mampu untuk hidup mandiri secara ekonomi.
- 5.# Ketergantungan hidup pada orang lain secara sosial dan ekonomi.

Permasalahan tersebut akan dialami oleh penyandang disabilitas selama hidupnya, apabila tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya. Jadi perlu adanya penanganan secara komprehensif, lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu serta diperlukan adanya kesungguhan dari semua pihak yang terkait.

Kenyataannya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas juga masih belum terpenuhi. Masih banyak dijumpai penyandang disabilitas yang dengan keterbatasannya harus bersaing dengan penduduk normal lainnya dalam rangka penggunaan pemenuhan hak untuk hidup mandiri, memenuhi kebutuhan ekonomi, eksistensi diri dan pengembangan potensi diri. Sementara undang-undang telah mengamanatkan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas pemberdayaan. Hak tersebut dijamin undang-undang dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian dan penyelesaian dari berbagai pihak yang terkait agar tidak terjadi diskriminasi hak-hak penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, menarik untuk mengkaji permasalahan faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut sudah dilakukan penelitian pada tahun 2012 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dinyatakan bahwa metode kualitatif mengarahkan pada prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang berujud tulisan atau dokumen pribadi, kata-kata yang terucap dan perilaku yang dapat diamati (1975 : 14). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dan observasi, selain itu studi kepustakaan juga dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk melengkapi data lapangan yang sudah yang diperoleh.

B.#Pembahasan

1.# Tinjauan Tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan mempunyai makna yaitu suatu proses kegiatan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat yang dibantu, agar

mereka dapat membantu dirinya sendiri. Konsep tersebut sejalan dengan konsep pertolongan dalam pekerjaan sosial yakni *"To help the people to help themselves"* atau membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Membantu orang, kelompok atau masyarakat agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pemberdayaan menurut Guttierrez *"Empowerment is the process of increasing personal, interpersonal, or political power so that individuals, families and communities can take action to improve their situation"*. Stephen P. Robbins menyatakan *Empowerment is a process that increases employees' intrinsic task motivation*. Pemberdayaan merupakan proses dalam rangka pengembangan pribadi, hubungan antar pribadi atau kekuatan politik agar individu-individu, keluarga dan masyarakat dapat memperbaiki keadaannya.²⁰

Dasar pemberdayaan adalah falsafah dan budaya demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan mereka. Pemberdayaan disini didasarkan pada asumsi pekerjaan sosial, dalam sistem kemanusiaan dan pemberdayaan:

- a.# All people deserve acceptance and respect
- b.# Clients know their situations best.
- c.# All human system behavior makes sense in context.
- d.# Empowerment is a collaborative process with clients and practitioners working together as a partners.
- e.# Empowering process views client systems as competent and capable, give access to resources and opportunities.
- f.# Clients must perceive themselves as causal agent able to effect change
- g.# Level of awareness is a key issue in empowerment; information is necessary for change to occur .²¹

Pemberdayaan penyandang disabilitas pada hakekatnya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat dipahami sebagai suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, perlu adanya peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada penyandang disabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Talenta, sebuah lembaga pemberdayaan kaum disabilitas di Solo mengungkapkan bahwa:

²⁰ padang-today.com/?mod=artikel&today=detil&id=216, Pemenuhan Hak Penyandang Cacat, diunduh pada tanggal 18 Januari 2011

²¹ Karla & Brenda, 1999, p 4-5

“Hasil survei yang mereka lakukan terhadap 100 fasilitas publik di Solo menunjukkan, 99 persen diantaranya tidak aksesibel bagi kaum difabel. Menurut Ketua Yayasan Talenta Sapto Nugroho, “Hanya satu persen fasilitas publik yang bisa diakses dengan mudah oleh penyandang cacat. Pemegang otoritas kota kurang memperhatikan hal ini. Pemahaman mereka terhadap hak dan kebutuhan para difabel kurang memadai.”²² “

Keterbatasan fisik yang dimiliki para penyandang cacat (kaum difabel) tidak sepenuhnya dipahami para pemegang otoritas di Kota Solo. Kemudahan bagi kaum difabel untuk mengakses berbagai fasilitas publik belum maksimal dilakukan. Bahkan sebagian besar pembangunan fasilitas publik dinilai tidak aksesibel bagi mereka.²³

Menurut Mansour Fakih :

“Salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus ‘*disable*’ ataupun ‘penyandang cacat’ dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki ‘*different abilities*’ atau yang di-Indonesiakan dan disingkat sebagai ‘*difabel*’²⁴”

Kritik keras terhadap meluasnya penggunaan istilah penyandang cacat datang dari Yogyakarta yang dimotori oleh Mansour Fakih²⁵. Fakih menjelaskan bahwa anggapan umum tentang penyandang cacat selama ini adalah hasil dari suatu konstruksi sosial (*socially constructed*) sehingga istilah kecacatan selama ini mengandung bias baik dan buruk atau normal dan tidak normal. Fakih mencontohkan orang yang tidak memiliki kaki karena suatu kecelakaan, misalnya, lantas dianggap cacat dan berdampak pada meluasnya anggapan di kalangan masyarakat awam bahwa orang yang cacat kakinya berarti dicap sebagai individu yang tidak mampu (*disabled person*) melakukan berbagai aktivitas yang mensyaratkan organ kaki. Realitas yang sebenarnya, bukan berarti orang tersebut tidak mampu, tetapi hanya membutuhkan alat bantu agar dapat melakukan sesuatu dengan kaki. Selanjutnya Fakih mengusulkan untuk mengganti istilah *disable* menjadi *diffable* (*different ability*)²⁶. Penyandang cacat bukan berarti tidak mampu (*disabled person*), tetapi hanyalah berbeda kemampuannya dengan yang lain (*difable*).

Dalam tulisan ini digunakan istilah penyandang disabilitas karena istilah ini dipakai secara resmi dalam hukum. Dalam CRPD, penyandang disabilitas dipandang

²² detiknews, 15 Juli 2004

²³ detiknews, 15 Juli 2004

²⁴ Mansour Fakih 1999

²⁵ Marcoes, Juliantara & Wahono, 2004

²⁶ Marcoes, Juliantara & Wahono, 2004

sebagai suatu keadaan yang menghalangi interaksi seseorang dengan lingkungannya. Jadi apabila halangan penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut sudah hilang atau tidak ada maka tidak akan ada lagi istilah disabel.

Usaha pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur terhadap kaum difabel inilah yang dikenal dengan pendekatan pemberdayaan terhadap kaum difabel. Perubahan sosial menggunakan analisis terhadap kaum difabel tidak hanya menghilangkan diskriminasi pembangunan akibat ideologi terhadap kaum difabel saja, tetapi juga memperhitungkan diskriminasi kelas, kasta dan suku, diskriminasi gender atau kesemuanya²⁷.

United Nations (1956: 83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. #Getting to know the local community
- b. #Gathering knowledge about the local community
- c. #Identifying the local leaders
- d. #Stimulating the community to realize that it has problems
- e. #Helping people to discuss their problem
- f. #Helping people to identify their most pressing problems
- g. #Fostering self-confidence
- h. #Deciding on a program action
- i. #Recognition of strengths and resources
- j. #Helping people to continue to work on solving their problems
- k. #Increasing people's ability for self-help

2. #Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. #Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperoleh data tentang jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah tabel tentang data penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2011.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas	
		L	P
1	Mantrijeron	157	126
2	Kraton	120	101
3	Mergangsan	126	88
4	Umbulharjo	229	216

²⁷ Fakih, 1999

5	Kotagede	83	96
6	Gondokusuman	150	150
7	Danurejan	132	97
8	Pakualaman	51	50
9	Gondomanan	63	48
10	Ngampilan	108	86
11	Wirobrajan	135	123
12	Gedongtengen	178	111
13	Jetis	148	108
14	Tegalrejo	156	117
	Jumlah	1.836	1.517
	Jumlah Total	3353	

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

Penyandang disabilitas di kota Yogyakarta dikategorikan sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Aturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas berdasarkan pada UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Selain aturan diatas, pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan aturan dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah berupaya mengembangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dimana aksesibilitas ini bisa dibedakan menjadi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik menurut Nugroho menyangkut pada tersedianya ruang publik yang *accessible* bagi difabel, seperti adanya *guiding block* di trotoar sebagai penunjuk jalan bagi tunanetra, pemasangan papan penunjuk yang jelas dan terbaca bagi orang *low vision*, pemasangan strip di bibir tangga, pembuatan *ramp* di trotoar dan bangunan publik seperti terminal, stasiun, bandara, lembaga pendidikan, puskesmas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas publik lainnya, termasuk sarana transportasi seperti bus, kereta api dan pesawat udara (Nugroho, 2014). Sedangkan aksesibilitas non-fisik menyangkut lingkungan sosial yang bisa menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan baik dan kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif bagi penyandang disabilitas.

Ruang publik yang sudah bisa diakses oleh penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta seperti gedung DPRD Kota, Kompleks Kantor Walikota, DPRD Provinsi, Stasiun Tugu, *guiding block* di sepanjang jalan Malioboro, Jalan Mangkubumi, Jalan Ahmad Yani, keraton, Taman Pintar, Hotel Melia Purosani, Hotel Quality dan

Puskesmas II Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu dengan tersedianya jalan landai sebagai jalur khusus bagi pengguna kursi roda serta toilet khusus. Lajur blok penanda sebagai tanda jalan bagi penyandang disabilitas diberi warna kuning. Lajur berada di bagian tengah trotoar dengan desain berbeda memiliki tanda menonjol pada permukaan jalan. Tanda tersebut merupakan standar penanda jalan khususnya tunanetra dan penyandang *low vision*. Meskipun demikian, aksesibilitas di beberapa tempat di kota Yogyakarta tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya seperti salah satunya adalah *guiding block* di sepanjang Malioboro justru dipakai oleh pedagang kaki lima untuk berjualan dan parkir kendaraan sehingga tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah dan masyarakat sendiri belum berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pendidikan dan pelatihan juga diupayakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk pendidikan, pemerintah sudah mengembangkan pendidikan inklusi yang berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No : 0063/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta. Pemerintah memberikan SK bagi sekolah yang mempunyai anak didik berkebutuhan khusus menjadi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI). SSPI di kota Yogyakarta sebanyak 21 sekolah mulai jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Di sekolah-sekolah tersebut terdapat fasilitas publik untuk penyandang disabilitas seperti lantai landai dengan pegangan besi untuk tuna daksa dan lantai timbul untuk tuna netra, globe timbul dan huruf braille untuk pembelajaran, serta guru pendamping khusus. Pada tahun 2012, pemerintah pusat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah menyelenggarakan SSPI yaitu berupa "Inclusive Education Award".

Terkait dengan pengembangan pendidikan, perpustakaan kota Yogyakarta juga sudah mengembangkan "*Blind Corner*" bagi penyandang disabilitas, dimana pelayanannya berbasis IT dengan perangkat komputer. Komputer mampu membaca buku elektronik yang tertera di layar PC sehingga bisa disimak pengunjung tuna netra. Penyandang tuna netra bisa membaca koleksi buku elektronik seperti novel-novel Indonesia terkenal, buku bicara digital, dan *file* digital.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi pemerhati dan pendamping penyandang

disabilitas untuk memberikan pelatihan dan bantuan. Tahun 2006 kerjasama dengan LSM Griya Manunggal mengadakan kursus komputer braille bagi anak penyandang tuna netra dan pemberian bantuan untuk pembelian alat yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas. Pada tahun yang sama melalui IKPSM (Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat) memberikan stimulan modal usaha kepada penyandang disabilitas sebesar Rp. 46.530.000. Kerjasama lain adalah dengan YAKUM dan dokter Harso dari Solo yaitu berupa pemberian alat bantu berupa kursi roda, kaki palsu, tongkat, alat bantu dengar, dsb. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri juga mengadakan program rehabilitasi masalah sosial setiap tahunnya dengan dana APBD. Keluarga atau penyandang cacat dapat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta. Selain terdapat dana sosial bagi penyandang disabilitas sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya.

Pelayanan publik yang lain adalah penyediaan transportasi umum yang dapat dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas yaitu bus Trans Jogja yang hanya beroperasi di Kota Yogyakarta. Trans Jogja difasilitasi dengan halte yang dilengkapi dengan tangga landai untuk penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda. Dalam prakteknya masih terdapat penyandang disabilitas dengan kursi roda yang susah mengakses karena tidak semua halte bus trans Jogja landai, bahkan banyak yang licin sehingga membahayakan bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga masih terkait dengan alat transportasi, kepolisian memberikan surat ijin mengemudi untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga sudah mengembangkan kendaraan khusus yang aksesibel bagi mereka.

b.# Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul

Berdasar hasil penelitian pada Dinas Sosial diperoleh data tentang jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Berikut adalah tabel tentang data penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul pada tahun 2011.

Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten bantul

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	Kretek	184
2	Pajangan	209
3	Jetis	284
4	Bantul	201
5	Banguntapan	166

6	Bambanglipuro	108
7	Dlingo	149
8	Piyungan	187
9	Pleret	109
10	Kasihani	193
11	Imogiri	315
12	Sewon	530
13	Srandakan	115
14	Pandak	278
15	Sanden	170
16	Sedayu	211
17	Pundong	188
	Jumlah Total	3597

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul juga merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dasar hukum penanganannya ada pada UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Pemerintah kabupaten Bantul sudah berhasil mengeluarkan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganan penyandang disabilitas termasuk dalam tugas Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

Fasilitas publik yang tersedia bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul termasuk paling banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fasilitas bagi penyandang disabilitas tersedia di Jogja Expo Centre (JEC), Terminal Giwangan, Plaza Ambarukmo, Bandara Adi Sucipto, Pasar Seni Gabusan, Stadion Bantul yaitu berupa toilet khusus dan jalan landai dengan pegangan besi. Pada tahun 2009, pembangunan Gedung Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat di Dusun Piring, Srihardono, Pundong, Kabupaten Bantul. Gedung tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY. Gedung ini memiliki sejumlah fasilitas, seperti aneka ruang terapi, panti wreda, ruang relaksasi, psikologi anak, dan kolam terapi. Kamar rawat inap juga tersedia dengan jumlah 48 kamar. Setiap tahun gedung tersebut bisa menampung 300 penyandang

disabilitas untuk mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan keahlian mereka.

c.# Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial diperoleh data tentang jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul. Berikut adalah tabel tentang data penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2011.

Tabel 3. Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	Panggung	351
2	Purwosari	440
3	Paliyan	343
4	Saptosari	595
5	Tepus	314
6	Tanjungsari	237
7	Rongkop	388
8	Girisubo	325
9	Semanu	768
10	Ponjong	864
11	Karangmojo	619
12	Wonosari	1061
13	Playen	255
14	Pathuk	523
15	Gedangsari	757
16	Nglipar	675
17	Ngawen	417
18	Semin	1023

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

Penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul. Dasar hukum penanganannya ada pada: UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di Kabupaten ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selama ini, penanganan penyandang disabilitas termasuk dalam tugas Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Belum diterapkannya aturan tersebut berimplikasi pada tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul yang masih minim dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, belum adanya

pembangunan fasilitas umum, apalagi untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pelatihan yang disediakan oleh pemerintah Gunungkidul masih minim. Organisasi Sosial Penyandang Cacat (OSPC) memperkirakan bahwa sekitar 4000 an atau separoh dari penyandang cacat di daerah ini masuk dalam usia produktif masih sangat minim mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi mereka. Pelatihan yang berkala dan berkelanjutan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dilakukan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga mengalokasikan dana yang ditujukan untuk warga disabilitas, dengan rincian masing-masing Rp. 300.000,- per orang per bulan. Dana ini belum bisa diperoleh oleh semua penyandang disabilitas karena keterbatasan anggaran yang ada.

d.# Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial diperoleh data tentang jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah tabel tentang data penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011.

Tabel 3. Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	Temon	423
2	Kokap	346
3	Panjatan	383
4	Galur	179
5	Lendah	255
6	Sentolo	312
7	Wates	321
8	Kalibawang	247
9	Girimulyo	287
10	Pengasih	189
11	Nanggulan	238
12	Samigaluh	208
	Jumlah Total	3388

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

Penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganannya berada di bawah

tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dan didasarkan pada UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Penanganan penyandang disabilitas selama ini termasuk dalam tugas Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Belum terdapat Peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan penguatan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo berupa pemberian bantuan, dimana pada tahun 2011 bantuan diberikan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo kepada 70 orang penyandang disabilitas masing-masing sebesar Rp. 500.000,-. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang diperoleh keterangan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, selama ini fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum tersedia apalagi pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas karena bukan menjadi tugas mereka. Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo hanya meliputi upaya pendampingan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk diantaranya penyandang disabilitas.

e.# Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial diperoleh data tentang jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Berikut adalah tabel tentang data penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2011.

Tabel 5. Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas	
		L	
1	Berbah	389	314
2	Cangkringan	199	159
3	Depok	159	168
4	Gamping	449	328
5	Godean	281	226
6	Kalasan	349	272
7	Minggir	258	242
8	Mlati	209	184
9	Moyudan	266	218
10	Ngaglik	253	210
11	Ngemplak	373	318
12	Pakem	251	216

13	Prambanan	157	196
14	Seyegan	197	181
15	Sleman	388	332
16	Tempel	381	277
17	Turi	207	201
	Jumlah	4.766	4.042
	Jumlah Total	8808	

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

Penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman seperti halnya di kabupaten lain dan Kota Yogyakarta masuk dalam bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dan didasarkan pada UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kabupaten Sleman telah menyusun Peraturan Daerah yang memenuhi hak-hak bagi penyandang cacat, yaitu Perda no 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel. Peraturan Daerah ini telah diimplementasikan dalam kegiatan Pemilu 2004, yaitu dengan membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat diakses dengan mudah bagi penyandang disabilitas, alat bantu (template kertas suara untuk tuna netra), logo kecacatan untuk tuna tungu dan wicara, serta bilik alternatif bagi tuna daksa dan tuna netra.

Kabupaten Sleman melalui dana APBN dari kementerian sosial sejak tahun 2006 telah mendapatkan Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi penyandang disabilitas berat sebesar Rp. 300.000,-, meskipun demikian bantuan tersebut belum dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari penyandang disabilitas berat.

Penanganan penyandang disabilitas selama ini dilaksanakan tugasnya oleh bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Meskipun demikian berdasar hasil wawancara dengan Kepala Bidang diperoleh keterangan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, tidak bertugas untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bangunan-bangunan untuk pelayanan publik seperti pemerintah daerah belum ramah bagi penyandang disabilitas meskipun sudah ada Perda no 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel.

2.# Perbedaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tahun 2011, data penyandang disabilitas Provinsi DIY terdapat sejumlah 29.051 orang, dimana jumlah penyandang disabilitas terbesar di Kabupaten Gunungkidul, urutan kedua Kabupaten Sleman dan terendah Kota Yogyakarta (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012). Meskipun jumlah penyandang disabilitas kota Yogyakarta terendah, tetapi untuk penyediaan fasilitas publiknya lebih banyak tersedia bagi penyandang disabilitas dibandingkan dengan keempat kabupaten di DIY.

Makna dari pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah pada hakekatnya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, untuk itu pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dipahami sebagai suatu proses dimana mereka didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada penyandang disabilitas. Tabel berikut adalah perbedaan pemberdayaan penyandang disabilitas di empat kabupaten dan kota di DIY.

Tabel 6. Perbedaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di DIY

Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas	Aturan Perda	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Kota Yogyakarta	3353	Peraturan Walikota Yogyakarta No 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> •# Ruang publik yang bisa diakses : gedung DPRD Kota, Kompleks Kantor Walikota, DPRD Provinsi, Stadion Tugu, Jalan Malioboro, Jalan Mangkubumi, Jalan Ahmad Yani, Keraton, Taman Pinter, Hotel Melia Purosani, Hotel Quality dan Puskesmas II Umbulharjo Kota Yogyakarta •# Pendidikan Inklusi dan blind corner di perpustakaan kota Yogyakarta. •# Transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas •# Pelatihan dan bantuan dana •# Ruang publik yang bisa diakses : Jogja Expo Centre, Terminal Giwangan, Plaza Ambarukmo, Bandara Adi Sucipto, Pasar Seni Gabusan, Stadion Bantul, dan Gedung Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat •# Pelatihan dan bantuan dana •# Pelatihan dan bantuan dana •# Pelatihan dan bantuan dana •# Pelatihan dan bantuan dana •# Kegiatan Pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas
Kabupaten Bantul	3597	Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	
Kabupaten Gunungkidul	9905	Perda Belum ada	
Kabupaten Kulon Progo	3388	Perda Belum ada	
Kabupaten Sleman	8808	Perda no 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel	
Jumlah	29051		

Sumber : Hasil penelitian diolah, 2012

Penyandang disabilitas di empat Kabupaten dan kota di provinsi DIY masih merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan belum menjadi bagian yang perlu ditangani secara khusus oleh pemerintah, dimana penanganannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur penyandang disabilitas sedangkan dua kabupaten (Kulon Progo dan Gunungkidul) belum menyusun Perdanya. Kota Yogyakarta paling banyak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibandingkan dengan kabupaten lainnya, disusul kabupaten Bantul dan Sleman.

Begitu juga untuk alokasi anggaran penyandang disabilitas dimasukkan dalam kelompok "penyandang masalah kesejahteraan sosial", sehingga kelompok ini belum mendapatkan perhatian yang khusus dan maksimal dari pengambil kebijakan. Alokasi anggaran untuk masing-masing kelompok nominalnya menjadi kecil-kecil, akibatnya pengembangan fasilitas publik termasuk pemberdayaan penyandang disabilitas belum secara maksimal dilakukan. Program pembinaan penyandang disabilitas biasanya berupa pelatihan ketrampilan, seperti menjahit, bordir, membuat keset, sapu, dan lain-lain dan tidak ada tindak lanjut seperti evaluasi dan monitoring untuk melihat hasil pelatihan tersebut, sehingga penyandang disabilitas menjadi lebih berdaya.

Tahun 2012, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Penyandang Cacat. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menjalankan amanah dari Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 14 dimana Perusahaan Negara maupun Swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakannya di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak perusahaan yang belum menempatkan tenaga kerja penyandang disabilitas, dimana untuk 100 tenaga kerja harus menempatkan 1 orang penyandang disabilitas.

Kebijakan khusus dari pemerintah DIY terkait dengan pelayanan transportasi publik yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas masih minim hanya bus Trans Jogja di kota Yogyakarta saja yang sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas, sementara di kabupaten lain di DIY belum tersedia. Begitu juga dengan pendidikan Kongres APSSI II dan Konferensi Nasional Sosiologi IV di Manado, 20-23 Mei 2015

inklusi dari Dinas Pendidikan masih terdapat di kota Yogyakarta dan belum di kabupaten lain di DIY. Analisis berikutnya terkait dengan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di provinsi DIY.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pemenuhan Hak Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta atas pemberdayaan masih mengalami beberapa kendala. Secara umum kendala tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu kendala yang berasal dari dalam diri dan di luar diri penyandang disabilitas.

a. #Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kendala yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pemberdayaan. Menurut subyek penelitian keadaan miskin ini telah menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk diberdayakan dan diajak maju serta berkembang. Sebagai contoh apabila ditawarkan program pelatihan, penyandang disabilitas telah berpikir tentang jarak yang harus ditempuh dari rumah sampai ke tempat pelatihan dan bagaimana harus ditempuh serta berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju tempat pelatihan. Para penyandang disabilitas juga masih berpikir bagaimana mereka dapat berangkat dan pulang dengan nyaman, mengingat di Provinsi DIYogyakarta masih minim fasilitas umum yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

b. #Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas

Derajat kecacatan yang dialami penyandang disabilitas juga merupakan kendala bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi haknya dalam rangka pemberdayaan. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas dapat diikuti dalam program pemberdayaan. Derajat kecacatan ini menyebabkan keterbatasan fisik penyandang disabilitas dalam mengikuti program pemberdayaan. Terutama bagi penyandang cacat berat yang tidak mungkin lagi dilakukan program pemberdayaan.

c. #Keterbatasan anggaran yang disediakan Pemerintah

Setiap tahun anggaran, melalui anggaran Dinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah mengalokasikan anggaran

sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk memberi bantuan bagi setiap orang penyandang disabilitas selama 1 (satu) tahun. Pemberian bantuan ini dilakukan secara bergilir. Artinya apabila dalam tahun tertentu seorang penyandang disabilitas telah menerima bantuan ini, maka pada tahun berikutnya dia tidak akan mendapat jatah bantuan lagi, kecuali tidak ada lagi penyandang disabilitas lain yang harus diberi bantuan. Bantuan ini diberikan pada penyandang disabilitas setelah mengikuti suatu pelatihan. Harapannya untuk memberi modal usaha bidang yang telah dilatihkan. Selain melalui APBD, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara untuk memberi bantuan hidup bagi penyandang disabilitas. Besar anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk setiap orang adalah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sama seperti bantuan dari APBD, bantuan dari APBN ini juga diberikan secara bergiliran, sehingga tidak setiap tahun penyandang disabilitas menerima bantuan ini.

d. #Keterbatasan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan hasil wawancara dengan subyek penelitian, sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat mereka kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik. Tempat ibadahpun bahkan masih belum ramah terhadap keberadaan mereka. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa sarana aksesibilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk penyandang disabilitas tetapi digunakan untuk kepentingan lain oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga peruntukannya telah berubah. Akibatnya penyandang disabilitas semakin terbatas kesempatannya untuk memperoleh akses untuk diberdayakan.

e. #Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas

Sampai saat ini masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas itu sebagai sesuatu yang aneh karena berbeda dengan yang lain. Dianggap aneh karena penyandang disabilitas memiliki tubuh yang berbeda dari yang lain. Kadang malah dianggap sebagai sesuatu yang rusak. Anggapan ini menimbulkan diskriminasi masyarakat pada penyandang disabilitas. Diskriminasi yang terjadi berdasar hasil penelitian seperti tidak diundang dalam acara hajatan warga dan tidak dilibatkan

dalam kegiatan warga kampung. Meskipun penyandang disabilitas tersebut tidak termasuk penyandang cacat berat. Secara psikis diskriminasi ini menyakitkan bagi mereka, secara hukum diskriminasi ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibat lebih lanjut dari diskriminasi ini bagi mereka adalah menjadi berkurang kesempatannya untuk memperoleh hak pemberdayaan.

C.#Kesimpulan

Penyandang disabilitas di empat Kabupaten dan kota di provinsi DIY masih merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan belum menjadi bagian yang perlu ditangani secara khusus oleh pemerintah, dimana penanganannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur penyandang disabilitas sedangkan dua kabupaten (Kulon Progo dan Gunungkidul) belum menyusun Perdanya. Kota Yogyakarta paling banyak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibandingkan dengan kabupaten lainnya, disusul kabupaten Bantul dan Sleman.

Terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas di Propinsi DIY, maka pemberdayaanya masih mengalami banyak kendala. Paling tidak terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi kendala yaitu kemiskinan, derajat kecacatan penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah, keterbatasan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Kendala kendala tersebut perlu dicarikan solusi dan ditemukan model yang sesuai untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergerakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Rahardjo, T. (2001). *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Read Book

Marcoes, L., Juliantara, D., & Wahono, F. (2004). *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih; Refleksi Kawan Seperjuangan* (Eds.), Yogyakarta: Sigab dan OXFAM Great Britain

Soekanto, Soerdjono, 1974, *Sosiologi Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan perundangan

Konvensi International Hak- Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/Menkes/Per/11/1999 tentang Rehabilitasi Medik

Hasil Penelitian

Etty Papuyungan, 2006, Pemberdayaan Penyandang Cacat Melalui Program Bersumberdaya Masyarakat (Studi Kasus Pemberdayaan Terhadap 7 Penyandang Cacat Melalui Program RBM di Kecamatan Rantepao Tana Toraja), Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar

Iin Findiana, 2006, Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Karyawan Penyandang Cacat dan Karyawan Bukan Penyandang Cacat, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Nugroho, Agung Cahyo.2004. *Peran Aktor dan Stakeholders dalam Menjamin Akses dan Kebutuhan Penyandang Cacat pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Sleman*, skripsi, Yogyakarta.

Makalah

Fakih, Mansour, Analisis Kritis Diskriminasi terhadap Kaum Difabel, dalam Diseminasi Nasional "Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel bagi Semua" di Yogyakarta 27 – 28 September 1999.

Saru Arifin, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Penyandang Cacat dalam Meraih Pekerjaan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) dalam Fenomena: Vol. 5 No. 2, September 2007

Web site

<http://www.padang-today.com>

<http://www.detiknews.com>

Selasa, 10 Juni 2014, Yogya Bentuk Komite Khusus Perlindungan Difabel,

[http://www.tempo.co/read/news/2014/06/10/058583887/Yogya-Bentuk-Komite-](http://www.tempo.co/read/news/2014/06/10/058583887/Yogya-Bentuk-Komite-Khusus-Perlindungan-Difabel)

[Khusus-Perlindungan-Difabel](http://www.tempo.co/read/news/2014/06/10/058583887/Yogya-Bentuk-Komite-Khusus-Perlindungan-Difabel), diunduh 17 April 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH
Sekretaris Panitia Kongres APSSI II dan KNS IV
di Manado, 20 – 23 Mei 2015

Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera buat kita semua,
Syalom,

Bapak Ibu yang sangat kami hormati dan banggakan, Para pengurus APSSI, Para pengurus ISI, yang sampai detik ini boleh ada bersama-sama di tempat ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan kami jurusan Sosiologi FISIP UNSRAT sebagai tuan rumah Kongres APSSI II dan Konferensi Nasional Sosiologi IV. Dulunya kami masih merasa kecil dibandingkan dengan Program Studi yang lain yang sudah sangat besar. Tapi acara ini menjadi cambuk bagi kami untuk meningkatkan kapabilitas dan berusaha memberi yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Dan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami karena acara ini merupakan iven pertama dan terbesar yang kami selenggarakan.

Kami menyadari bahwa suksesnya acara ini tak lepas dari kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian meski telah dua kali kami menolak. Namun, ketiga kalinya kami tidak sanggup untuk menolak lagi. Tentunya kami bersyukur karena acara ini sangat didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi, Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, beserta Dosen dan Mahasiswa. Diatas semuanya itu, tentunya karena berkat tuntunan dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dimampukan untuk menyelenggarakan acara ini.

Kami menyadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang telah kami perbuat, yang mungkin kurang menyenangkan hati bapak ibu sekalian. Oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang manis boleh Bapak dan Ibu bawa pulang dan kemudian bisa menjadi alasan untuk boleh kembali lagi. Namun, hal-hal yang tidak mengenakan hati boleh ditinggalkan disini sebagai bahan koreksi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi atas nama pengurus dan panitia kami mengucapkan terima kasih. Kiranya kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan Sosiologi menjadi lebih maju! Terima kasih.

Manado, 22 Mei 2015
Sekretaris Panitia Kongres APSSI II dan KNS IV Manado

Dr. Shirley Y. V. I. Goni, MSi